



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 202

2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3

BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS

2.1	Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas	5
2.2	Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional	5

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SOPD

3.1	Kebijakan Keuangan	7
3.2	Indikator Pencapaian Target Kinerja	7

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.2	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	12
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	21
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	27
5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Ekuitas	33

BAB VI PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1	Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan	35
6.2	Pengungkapan Lainnya	36
6.3	Struktur Organisasi	36
6.4	Kepemimpinan OPD	38

BAB VII PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan antara lain :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
- f. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - x. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
 - y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - z. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - aa. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
 - bb. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
 - cc. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
 - dd. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
 - ee. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - ff. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 - gg. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
 - hh. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
 - ii. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2022

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional

BAB III Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD

- 3.1. Kebijakan Keuangan
- 3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

- 6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan
- 6.2. Pengungkapan Lainnya
- 6.3. Struktur Organisasi
- 6.4. Kepemimpinan OPD

BAB VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman merupakan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dengan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku entitas akuntansi yang berada dibawah koordinasinya. Unit Pelaksana Teknis tersebut terdiri atas UPT Balai Benih Ikan (BBI), UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPPP) dan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2022, tercatat sebanyak 108 orang, dengan rincian PNS menurut jenjang pendidikannya yaitu sebanyak 9 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 75 orang berpendidikan Sarjana (S1), 33 orang berpendidikan Diploma dan 5 orang berpendidikan SMA.

Selain PNS, dalam mendukung kegiatan operasional Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdapat personil tenaga kontrak berjumlah 45 orang yang terdiri atas 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 2 orang Penyelia Mitra Tani (PMT), 3 orang Tenaga Administrasi, 2 orang Penyuluh Perikanan Bantu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 4 orang Tenaga Pembenihan, 2 orang Tenaga Operasional Kapal, 1 orang Tenaga Operasional Posikandu dan 10 orang Tenaga Kebersihan, 1 orang tenaga teknis logistic & pemasaran hasil, 1 orang tenaga teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman, 4 orang petugas teknis BBI, 1 orang Tenaga Kebun, 1 orang Tenaga Pengelola Pembibitan, 1 orang Tenaga Pembibitan Unggas dan 1 orang Sopir.

2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pergeseran keenam atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perwako No. 92 Tahun 2021 Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman
14. Perwako No. 47 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN PENCAPAIAN TARGET BELANJA APBD

3.1. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota Pariaman Tahun 2022 dan DPA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2022 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman selaku OPD memperoleh target alokasi anggaran belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Anggaran Belanja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan
5.	BELANJA	22.582.599.544	22.582.599.544	20.272.946.372,00
5.1	BELANJA OPERASIONAL	19.364.089.544	19.364.089.544	17.214.836.372,00
5.1.1	- Belanja Pegawai	12.252.833.072	12.252.833.072	11.643.551.093,00
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	6.601.256.472	7.111.256.472	5.571.285.279,00
5.1.6	- Belanja Bantuan Sosial	510.000.000	-	-
5.1	BELANJA MODAL	3.218.510.000	3.218.510.000	3.058.110.000
5.2.2	- Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
5.2.3	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.510.000	63.510.000	58.110.000,00
5.2.4	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.000.000	155.000.000	-

3.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBD TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022. Berikut disajikan ringkasan APBD Perubahan TA 2022 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Ringkasan APBD Perubahan TA 2022

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Pendapatan	340.000.000,00	340.000.000,00	-
Pendapatan Asli Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	-
Belanja	22.582.599.544,00	21.461.299.122,00	(1.121.300.422,00)
Belanja Tidak Langsung	12.762.833.072,00	11.671.551.093,00	(1.091.281.979,00)
Belanja Langsung	9.819.766.472,00	9.789.748.029,00	(30.018.443,00)
Surplus/ (Defisit)	(22.242.599.544,00)	(21.121.299.122,00)	1.121.300.422,00



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan setelah perubahan yaitu: (1) pendapatan direncanakan sebesar Rp 340.000.000,00; (2) belanja direncanakan sebesar Rp 21.461.299.122,00; dan (3) defisit direncanakan sebesar Rp 21.121.299.122,00.

Perubahan Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan TA 2022 dilakukan sehubungan:

1. Penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan;
2. Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp 340.000.000,00 setelah perubahan tetap sebesar Rp 340.000.000,00 tidak terjadi perubahan atau berkurang/bertambah sebesar 0 % seperti tertera dalam **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2022

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
Pendapatan	340.000.000,00	340.000.000,00	-
Pendapatan Asli Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	-

Realisasi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2022 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Rp 151.875.000,00 atau 44,67% dari total anggaran sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021
Pendapatan	340.000.000,00	151.875.000,00	(188.125.000,00)	44,67	132.473.000,00
Pendapatan Asli Daerah	340.000.000,00	151.875.000,00	(188.125.000,00)	44,67	132.473.000,00

Pada pos belanja terjadi penurunan dari target semula sebesar Rp 22.582.599.544,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 21.461.299.122,00 atau berkurang sebesar Rp 1.121.300.422,00 atau 4,97 % sebagaimana tertera pada **Tabel 3.5** berikut.

Tabel 3.5 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Anggaran Perubahan Tahun 2022

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	% Naik/(Turun)
Belanja	22.582.599.544,00	21.461.299.122,00	(4,97)
Belanja Tidak Langsung	12.762.833.072,00	11.671.551.093,00	(8,55)
Belanja Langsung	9.819.766.472,00	9.789.748.029,00	(0,31)

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Urusan wajib dan pilihan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas selaku entitas akuntansi dan pelaporan beserta 3 (tiga) UPT dibawah koordinasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selaku entitas akuntansi. Jumlah keseluruhan anggaran belanja pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Rp 21.461.299.122,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.370.258.322,00 atau 94,92%. Rincian belanja per Sub Unit Organisasi dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sub Unit Organisasi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021
Belanja	21.461.299.122,00	20.370.258.322,00	(1.091.040.800,00)	94,92	16.961.588.666,00
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20.272.946.372,00	19.283.473.914,00	(989.472.458,00)	95,12	15.508.971.107,00
UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	526.963.050,00	467.626.323,00	(59.336.727,00)	88,74	547.848.266,00
UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	202.172.700,00	193.909.410,00	(8.263.290,00)	95,91	209.620.466,00
UPT. Balai Benih Ikan	459.217.000,00	425.248.675,00	(33.968.325,00)	92,60	695.148.827,00

Berdasarkan **Tabel 3.5** di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi dibandingkan anggaran belanja pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2022 adalah sebesar 95,12% dan pada UPT. Balai Benih Ikan sebesar 92,60 %. Persentase paling rendah pada UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yaitu sebesar 88,74% dan yang tertinggi pada UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan yaitu sebesar 95,91%.

Realisasi Belanja – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama TA 2022 dapat disajikan pada **Tabel 3.6** berikut :

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih (Kurang)	%
BELANJA DAERAH	21.461.299.122,00	20.370.258.322,00	1.091.040.800,00	94,92
BELANJA OPERASI	18.401.589.122,00	17.594.448.322,00	807.140.800,00	95,61
Belanja Pegawai	11.671.551.093,00	11.251.433.793	420.117.300,00	96,40
Jasa	6.730.038.029,00	6.343.014.529	387.023.500,00	94,25
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0,00
BELANJA MODAL	3.059.710.000,00	2.775.810.000,00	283.900.000,00	90,72
Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.727.000.000	273.000.000,00	90,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.710.000,00	48.810.000	10.900.000,00	81,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	0,00

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2022 adalah sebesar 94,92 % dan tidak terdapat kendala dalam pencapaian realisasi.

- Jumlah Realisasi Belanja Operasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota Pariaman pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.594.448.322,00. Jumlah tersebut mencapai (95,61%) dari jumlah anggaran.



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Jumlah Realisasi Belanja Modal Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota Pariaman pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.775.810.000,00. Jumlah tersebut mencapai (90,72%) dari jumlah anggaran.



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 adalah basis akrual. Adanya PP tersebut pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam LKPD adalah basis kas untuk pengakuan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , serta basis akrual untuk pengakuan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO) , dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Basis akrual untuk Neraca, LO, LPE, berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, Pendapatan – LO, Beban, Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SOPD

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan beberapa informasi, diantaranya yaitu 1) besaran realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD, 2) nilai persentase realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya dan 3) realisasi pendapatan dan belanja tahun sebelumnya. Berikut Tabel yang menyajikan realisasi anggaran tahun 2022 :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan LRA	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67	132.473.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67	132.473.000,00
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67	132.473.000,00
2	Belanja	21.461.299.122,00	20.370.258.322,00	94,92	16.961.588.666,00
2.1	Belanja Operasi	18.401.589.122,00	17.594.448.322,00	95,61	16.444.817.656,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.671.551.093,00	11.251.433.793,00	96,40	9.772.923.248,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.730.038.029,00	6.343.014.529,00	94,25	5.894.546.408,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	-	-		777.348.000,00
2.2	Belanja Modal	3.059.710.000,00	2.775.810.000,00	90,72	516.771.010,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.727.000.000,00	90,90	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.710.000,00	48.810.000,00	81,75	52.285.010,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		299.077.000,00
2.2.4	Belanja Modal Dalam, Irigasi dan Jaringan	-	-		165.409.000,00
Surplus/ (Defisit)		(21.121.299.122,00)	(20.218.383.322,00)	95,73	(16.829.115.666,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(21.121.299.122,00)	(20.218.383.322,00)	95,73	(16.829.115.666,00)

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di tahun 2022 merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri atas pendapatan retribusi daerah. Berikut tabel yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan di tahun 2022:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
1.	PENDAPATAN	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67 %
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67 %
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67 %

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 151.875.000,00 atau persentase capaian sebesar 44,67 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 340.000.000,00. Rendahnya pencapaian realisasi pendapatan tahun 2022 ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

- Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah retribusi dari penjualan indukan, calon induk dan benih lele mutiara. Penjualan induk/ bibit ikan di tahun 2022 ini tidak dapat mencapai target dikarenakan anggaran pemerintah daerah lain selaku pembeli atas produk induk ikan dialihkan untuk penanganan Covid-19, sedangkan rendahnya penjualan bibit ikan disebabkan karena kondisi cuaca di tahun 2022 yang kurang mendukung dalam proses pembenihan dan pembesaran ikan.
- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena retribusi yang bisa ditarik hanya RPH dengan item retribusi pemeriksaan antemortem, pemeriksaan postmortem dan pemakaian tempat. Sedangkan retribusi di TPH tidak dapat dilakukan lagi sejak Oktober 2022 karena adanya temuan inspektorat yang menyatakan bahwa pemotongan ternak hanya boleh dilakukan di RPH sedangkan di TPH bersifat illegal.
- Anggaran yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi yang ada

Berikut dibawah ini tabel penjelasan anggaran dan realisasi obyek retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di Tahun 2022 :

**Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
(Rincian per Jenis Retribusi Tahun 2022)**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	340.000.000,00	151.875.000,00	44,67 %
	- Retribusi Pemakaian Alat	65.000.000,00	0,00	0,00 %
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	23.825.000,00	47,65 %
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000,00	128.050.000,00	56,91 %

Realisasi pendapatan tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,65%. Kenaikan nilai realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan yang bersumber dari retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu dari penjualan benih lele mutiara, calon induk maupun induk ikan. Berikut dibawah ini perbandingan antara realisasi Pendapatan tahun 2022 dengan 2021.

Tabel 5.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% kenaikan/ penurunan
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	151.875.000,00	132.473.000,00	14,65 %
	- Retribusi Pemakaian Alat	0,00	65.000.000,00	(100,00)
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	23.825.000,00	34.005.000,00	(29,94) %
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.050.000,00	33.468.000,00	282,60 %

5.1.2 Belanja

Belanja yang disajikan pada LRA terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Hibah, sedangkan untuk Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Persentase capaian realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya di tahun 2022 adalah sebesar 94,92%, dengan capaian belanja operasi sebesar 95,61% dan belanja modal sebesar 90,72%. Besaran nilai anggaran belanja pegawai adalah 96,40% dari jumlah anggaran belanja operasi, dengan realisasi sebesar 95,61% dari anggarannya. Untuk belanja modal, persentase capaian realisasi belanja modal tanah sebesar 90,90% dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar 81,75%, sedangkan untuk belanja gedung dan bangunan 0% dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar 0%.

Rendahnya realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 disebabkan oleh penganggaran yang terlalu tinggi. . Berikut tabel yang menyajikan uraian besaran anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
2.	BELANJA	21.461.299.122,00	20.370.258.322,00	94,92 %
2.1.	BELANJA OPERASI	18.401.589.122,00	17.594.448.322,00	95,61 %
2.1.1.	Belanja Pegawai	11.671.551.093,00	11.251.433.793,00	96,40 %
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.038.029,00	6.343.014.529,00	94,25 %
2.1.3.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00 %
2.2.	BELANJA MODAL	3.059.710.000,00	2.775.810.000,00	90,72 %
2.2.1.	Belanja Tanah	3.000.000.000,00	2.727.000.000,00	90,90 %
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	59.710.000,00	48.810.000,00	81,75 %
2.2.3.	Belanja Gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00 %
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00 %

Realisasi belanja tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,10%. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan belanja modal tanah untuk Rumah Potong Hewan. Rincian lebih lanjut mengenai perbandingan realisasi belanja tahun 2022 dan 2021 dapat diuraikan pada **Tabel 5.6** dibawah ini.

Tabel 5.6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
2.	BELANJA	20.370.258.322,00	16.961.588.666,00	20,10 %
2.1.	BELANJA OPERASI	17.594.448.322,00	16.444.817.656,00	6,99 %
2.1.1.	Belanja Pegawai	11.251.433.793,00	9.772.923.248,00	15,13 %
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.343.014.529,00	5.894.546.408,00	7,61 %
2.1.3.	Belanja Hibah	0,00	777.348.000,00	(100,00) %
2.2.	BELANJA MODAL	2.775.810.000,00	516.771.010,00	437,15 %
2.2.1.	Belanja Tanah	2.727.000.000,00	0,00	- %
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	48.810.000,00	52.285.010,00	(6,65) %
2.2.3.	Belanja Gedung dan bangunan	0,00	299.077.000,00	(100,00) %
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	165.409.000,00	(100,00) %

a) Belanja Operasi

Jumlah realisasi belanja operasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 17.594.448.322,00. Jumlah tersebut mencapai 95,61 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 18.401.589.122,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp 16.444.817.656,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 1.149.630.666,00 atau 6,99 %.

• Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 11.251.433.793,00 atau 96,40% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 11.671.551.093,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 9.772.923.248,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 1.478.510.545,00 atau 15,13 % karena adanya penambahan CPNS pada tahun 2022.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2022 dapat dirinci per jenis belanja pegawai, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA PEGAWAI	11.671.551.093,00	11.251.433.793,00	96,40 %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.263.317.393,00	7.064.223.954,00	97,26 %
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.289.683.700,00	4.075.509.839,00	95,01 %
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.550.000,00	111.700.000,00	94,22 %

Apabila dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi belanja pegawai berdasarkan entitas akuntansi di tahun 2022, capaian realisasi dibandingkan anggaran pada masing-masing entitas akuntansi lebih dari 90%. Berikut dibawah ini tabel uraian anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2022 berdasarkan sub organisasi.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA PEGAWAI	11.671.551.093,00	11.251.433.793,00	96,40 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	11.643.551.093,00	11.225.833.793,00	96,41 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	9.400.000,00	8.600.000,00	91,49 %
3	UPT Pusat Kes Hewan dan IB	9.400.000,00	8.600.000,00	91,49 %
4	UPT Balai Benih Ikan	9.200.000,00	8.400.000,00	91,30 %

Jika dibandingkan antara realisasi belanja pegawai tahun 2022 dengan 2021, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah realisasi belanja pegawai sebesar 15,13%. Perbandingan belanja pegawai per jenis belanja pegawai tahun 2022 dengan 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.9 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021
(Rincian Per Jenis Belanja Pegawai)**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
	BELANJA PEGAWAI	11.251.433.793,00	9.772.923.248,00	15,13 %
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.064.223.954,00	6.819.985.969,00	3,58 %
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.075.509.839,00	2.654.878.189,00	53,51 %
	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	111.700.000,00	298.059.090,00	(62,52) %

Kenaikan belanja pegawai tahun 2022 dibandingkan 2021 dipengaruhi oleh besarnya kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 15,13%, karena adanya penerimaan CPNS pada tahun 2022 untuk dilakukan pembayaran gajinya.

Jika ditinjau berdasarkan sub organisasi yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagaimana disajikan pada tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	% Kenaikan/ (Penurunan)
	BELANJA PEGAWAI	11.251.433.793,00	9.772.923.248,00	15,13 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	11.225.833.793,00	9.717.498.248,00	15,52 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	8.600.000,00	17.800.000,00	(51,69) %
2	UPT Pusat Kesehatan Hewan dan IB	8.600.000,00	18.600.000,00	(53,76) %
4	UPT Balai Benih Ikan	8.400.000,00	19.025.000,00	(55,85) %

• **Belanja Barang dan Jasa**

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.343.014.529,00 atau 94,25 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.730.038.029,00. Jumlah anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 dapat dirinci per jenis belanja barang bersangkutan, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja
Barang dan Jasa Tahun 2022
(Rincian Per Jenis Belanja Barang dan Jasa)**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.730.038.029,00	6.343.014.529,00	94,25 %
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4.212.627.322,00	4.056.572.480,00	96,30 %
2	Belanja Jasa Kantor	1.349.940.000,00	1.216.572.292,00	90,12 %
3	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	4.092.000,00	2.989.224,00	73,05 %
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	7.500.000,00	4.500.000,00	60,00 %
5	Belanja kursus / Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	22.500.000,00	17.500.000,00	77,78 %
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.880.000,00	174.133.700,00	86,69 %
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.450.000,00	41.228.500,00	81,72 %
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	417.148.707,00	406.666.583,00	97,49
9	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	348.200.000,00	348.200.000,00	100,00 %
10	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	116.700.000,00	74.651.750,00	63,97 %

Pencapaian target belanja barang dan jasa tahun 2022 dari masing-masing jenis belanja barang tersebut dipengaruhi oleh hal-hal antara lain :

- Tidak terealisasinya belanja sewa peralatan dan mesin dikarenakan tidak dilaksanakannya acara yang mempergunakan sewa kendaraan bermotor karena tidak dapat terlaksana.
- Realisasi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek serta pendidikan dan pelatihan hanya terealisasi sebesar 29,41 % dikarenakan salah satu masuk daftar reconfusing anggaran TA 2021.

Berdasarkan Entitas Akuntansi yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, hanya pada UPT Balai Benih Ikan yang realisasi anggarannya dibawah 80%. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia tidak dapat direalisasikan karena digunakan untuk mengatasi defisit anggaran Pemerintah Kota Pariaman. Berikut dibawah ini perbandingan anggaran dan belanja tahun 2021 berdasarkan sub organisasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

**Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.303.281.144,00	5.894.546.408,00	93,52 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4.911.232.430,00	4.672.162.849,00	95,13 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	647.877.100,00	530.048.266,00	81,81 %
3	UPT Puskeswan dan IB	198.141.500,00	181.620.466,00	91,66 %
4	UPT Balai Benih Ikan	546.030.114,00	510.714.827,00	93,53 %

Jika dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp 6.343.014.529,00 dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar Rp 5.894.546.408,00 maka terdapat kenaikan belanja sebesar 7,61 %. Kenaikan ini dipengaruhi oleh rata-rata kenaikan belanja pada masing-masing jenis belanja barang dan jasa yang hanya saja pada UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian realisasi yang hanya 88,74 %. Perbandingan tersebut dapat dirinci per jenis belanja barang dan jasa, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.13 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021
(Rincian Per Jenis Belanja)**

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.343.014.529,00	5.894.546.408,00	7,61 %
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4.056.572.480,00	3.627.078.363,00	11,84 %
2	Belanja Jasa Kantor	1.216.572.292,00	1.265.469.972,00	(3,86) %
3	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	2.989.224,00	2.945.160,00	1,50 %
4	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	4.500.000,00	0,00	- %
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	406.666.583,00	413.170.663,00	(1,57) %
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	17.500.000,00	5.000.000,00	250,00 %
7	Belanja Pemeliharaan	215.362.200,00	193.945.050,00	11,04 %
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	987.200,00	(100,00) %
9	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	422.851.750,00	385.950.000,00	9,56 %

Jika ditinjau berdasarkan Entitas Akuntansi yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman beserta Unit-Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Entitas Pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, jumlah realisasi belanja barang tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.14 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	% Kenaikan / (Penurunan)
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.343.014.529,00	5.894.546.408,00	7,61 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5.283.330.121,00	4.672.162.849,00	13,08 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan	459.026.323,00	530.048.266,00	(13,40) %
3	UPT Puskeswan dan IB	185.309.410,00	181.620.466,00	2,03 %
3	UPT Balai Benih Ikan	415.348.675,00	510.714.827,00	(18,67) %

Dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp 6.343.014.529,00 terdapat belanja barang dan jasa yang memenuhi ketentuan sesuai kebijakan akuntansi untuk tidak dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap peralatan dan mesin pada belanja alat kesehatan senilai Rp. 6.100.000,-

b) Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja modal Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.775.810,00. Jumlah tersebut mencapai 90,72 % dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.059.710.000,00. Berikut di bawah ini tabel yang menunjukkan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA MODAL	3.059.710.000,00	2.775.810.000,00	90,72 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3.058.110.000,00	2.774.310.000,00	90,72 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Puskesmas dan IB	0,00	0,00	0,00 %
3	UPT Balai Benih Ikan	1.600.000,00	1.500.000,00	93,75 %

Jika dibandingkan belanja modal tahun 2022 dengan 2021, terdapat kenaikan belanja sebesar 437,15 %. Hal ini terkait dengan kenaikan anggaran 2022 dibandingkan 2021. Berikut tabel yang menyajikan perbandingan belanja modal tahun 2022 dengan 2021.

Tabel 5.17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dengan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	% Kenaikan/ (Penurunan)
	BELANJA MODAL	2.775.810.000,00	516.771.010,00	437,15 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	2.774.310.000,00	341.962.010,00	711,29 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Puskesmas dan IB	0,00	9.400.000,00	-100,00 %
3	UPT Balai Benih Ikan	1.500.000,00	165.409.000,00	-99,09 %

• **Belanja Peralatan dan Mesin**

Jumlah realisasi belanja modal - peralatan dan mesin pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 48.810.0000,00 atau 81,75% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 59.710.000,00

Jika ditinjau berdasarkan Entitas Akuntansi yang ada pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman beserta Unit-Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Entitas Pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, jumlah anggaran dan realisasi belanja modal - peralatan dan mesin tahun 2022 tersebut dapat dirinci sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	59.710.000,00	48.810.000,00	81,75 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	58.110.000,00	47.310.000,00	81,41 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Puskesmas dan IB	0,00	0,00	0,00 %
3	UPT Balai Benih Ikan	1.600.000,00	1.500.000,00	93,75 %

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 81,75 % diantaranya adalah realisasi belanja pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Salah satu faktor rendahnya realisasi belanja adalah karena pada UPT. Puskesmas dan IB dan UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian tidak menganggarkan belanja peralatan dan mesin.

• **Belanja Gedung dan Bangunan**

Jumlah realisasi belanja gedung dan bangunan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 0,00 atau 0%. Anggaran dan realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2022 per entitas akuntansi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00 %
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Puskesmas dan IB	0,00	0,00	0,00 %
3	UPT Balai Benih Ikan	0,00	0,00	0,00 %

• **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 0,00. Anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di tahun ini tidak terdapat pada Dinas maupun UPT. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per entitas akuntansi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Thd Anggaran
	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00 %
1	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	0,00	0,00	0,00 %
2	UPT Puskesmas dan IB	0,00	0,00	0,00 %
3	UPT Balai Benih Ikan	0,00	0,00	0,00 %

SURPLUS / DEFISIT- LRA

Surplus / defisit adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Untuk jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 151.875.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 20.370.258.322,00 maka realisasi APBD tahun 2022 pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan mengalami defisit sebesar Rp 20.218.383.322,00.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

1) Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 98.506.378,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 199.544.000,00. Saldo tersebut merupakan nilai dari persediaan dengan rincian sebagai berikut :

a) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 98.506.378,00 dan 199.544.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Saldo Persediaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	ATK	Rp 1.168.070	Rp 1.375.000
2	Lainnya (Karcis Retribusi)		
3	Persediaan Alat Listrik		Rp 141.000
4	Persediaan Bibit Ternak (Ikan)	Rp 39.360.000	Rp 83.252.000
5	Persediaan peralatan kebersihan/bahan lainnya	Rp 1.225.000	Rp 822.000
6	Persediaan Bahan Baku Bangunan		
7	Persediaan Obat-Obatan lainnya	Rp 8.703.308	Rp 2.531.500
8	Persediaan Bibit Tanaman		
9	Persediaan Pakan Ternak	Rp 26.100.000	Rp 111.422.500
10	Persediaan Bahan Kimia	Rp 21.950.000	Rp -
11	Persediaan Alat Kesehatan Hewan		Rp -
	Jumlah	Rp 98.506.378	Rp 199.544.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

2) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.778.022.923,00 yang merupakan aset berwujud dengan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 1.199.202.733,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 16.578.820.190,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.22 Saldo Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	Rp 7.087.144.000	Rp 4.360.144.000	Rp 2.727.000.000
2	Peralatan dan Mesin	11.199.674.026	11.156.774.026	Rp 42.900.000
3	Gedung dan Bangunan	19.988.099.581	19.822.690.581	Rp 165.409.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.887.790.800	2.053.199.800	Rp (165.409.000)
5	Aset Tetap Lainnya	25.014.800	25.014.800	Rp -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	121.552.000	121.552.000	Rp -
7	Akumulasi Penyusutan	Rp (22.531.252.284)	Rp (20.960.555.017)	Rp (1.570.697.267)
	Jumlah	Rp 17.778.022.923	Rp 16.578.820.190	Rp 1.199.202.733

Penjelasan atas kenaikan/ penurunan per jenis aset tetap dijelaskan sebagai berikut :

a) Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp 7.087.144.000,00. Saldo aset berupa tanah per tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2021	Rp 4.360.144.000,00
Mutasi tambah :	
- Pembelian	Rp 2.727.000.000,00
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Des 2022	Rp 7.087.144.000,00

kenaikan aset senilai Rp 2.727.000.000,00 merupakan pembelian tanah.

b) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 11.199.674.026,00 dan Rp 11.156.774.026,00 Peningkatan saldo peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Des 2021	Rp 11.156.774.026,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	Rp 48.810.000,00
Mutasi Tambah :	
- Mutasi sepeda motor & lemari ke dinas UPT. BPPP	Rp 387.218.625,00
- Mutasi Sepeda Motor Dinas ke UPT.Puskesmas & IB	Rp 37.968.650,00
- Mutasi anas SKPD ke UPT. BBI	Rp 51.573.400,00
- Mutasi sepeda motor ke Penyuluh	Rp 476.760.675,00
- Tidak dikapitalisasi	Rp 5.910.000,00
Saldo per 31 Des 2022	Rp 11.199.674.026,00

Terdapat perbedaan belanja modal peralatan dan mesin di LRA dengan penambahan saldo modal peralatan dan mesin di Neraca sebesar Rp 42.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Neraca = Rp 42.900.000,00
LRA = Rp 48.810.000,00 -
 = Rp 5.910.000,00

Selisih tersebut merupakan :

Mutasi (-) senilai Rp. 5.910.000,00 yaitu terdiri dari :

- Alat Kesehatan Kerja Rp. 910.000,00
- Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Rp. 5.000.000,00

c) Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 19.988.099.581,00 dan Rp 19.988.099.581,00. Data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kenaikan pada nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2021	Rp 19.988.099.581,00
Mutasi tambah :	
- Pembelian	
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Des 2022	Rp 19.988.099.581,00

Terdapat perbedaan belanja modal gedung dan bangunan LRA dengan penambahan saldo gedung dan bangunan di Neraca sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Neraca = Rp 0,00
LRA = Rp 0,00 -
 = Rp 0,00

Selisih 0 tersebut merupakan tidak adanya mutasi tambah maupun mutasi kurang pada gedung dan bangunan.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.887.790.800,00 dan Rp 1.887.790.800,00. Data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kenaikan pada nilai aset tetap Jalan, Irigas dan Jaringan.

Mutasi Jalan, Irigas dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2021	Rp 1.887.790.800,00
Mutasi tambah :	
- Pembelian	Rp -
Mutasi kurang :	
-	Rp -
Saldo per 31 Des 2022	Rp 1.887.790.800,00

Tidak Terdapat perbedaan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA dengan penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca. Tidak adanya mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

e) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per tanggal 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021, tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 25.014.800,00. Saldo aset tetap lainnya ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.23 Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021
1	Tanaman Kehutanan	Rp 6.125.000,00	Rp 6.125.000,00
2	Aset Tetap Lainnya *	Rp 18.889.800,00	Rp 18.889.800,00
	Jumlah	Rp 25.014.800,00	Rp 25.014.800,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu konstruksi yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan 2021. Mutasi KDP per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2021	Rp 121.552.000,00
Mutasi tambah :	
	Rp -
Mutasi kurang :	
	Rp -
Saldo per 31 Des 2022	Rp 121.552.000,00

Berikut dibawah ini rincian saldo KDP per 31 Desember 2022 :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Rehab Ruang Labor dan Konseling	1.600.000
2	Perencanaan Konstruksi Pagar dan Kanopy BBI	8.000.000
3	Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang Kantor	16.000.000
4	Perencanaan Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan & MCK	10.000.000
5	Perencanaan Tambatan Dermaga 80%	39.952.000
6	Perencanaan Talut Dermaga Apung Pulau Tengah	36.000.000
7	Perencanaan Rehab TPI	10.000.000
	Jumlah	121.552.000

g) Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp 22.531.252.284,00 dan Rp 20.960.555.017,00. Akumulasi penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per 31 Desember 2022 berdasarkan Sub Unit Organisasi dan Obyek Penyusutan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.24 Uraian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No.	Sub Unit Organisasi	Akumulasi Penyusutan		
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
		Rp 10.839.727.837,00	Rp 9.827.466.606,00	Rp 1.864.057.841,00
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Rp 8.206.693.959,00	Rp 3.972.987.328,00	Rp 1.490.369.883,00
2	UPT Balai Penyuluh Pertanian	Rp 1.700.901.976,00	Rp 1.090.155.030,00	Rp 6.881.500,00
3	UPT Pusat Kesehatan Hewan dan IB	Rp 509.145.002,00	Rp 533.573.624,00	Rp 57.021.458,00
4	UPT Balai Benih Ikan	Rp 422.986.900,00	Rp 4.230.750.624,00	Rp 309.785.000,00

3) Aset Lainnya

a) Aset Lain-lain

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 460.939.032,58, Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Mutasi Aset lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Des 2021	Rp 595.263.532,58
Mutasi tambah :	
- Mutasi antar SKPD	Rp -
Mutasi kurang :	
- Penghapusan lap top Lenovo Rusak Berat	Rp 134.324.500,00
Saldo per 31 Des 2021	Rp 460.939.032,58

Berikut rincian aset lainnya per sub unit organisasi (entitas akuntansi) pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per tanggal pelaporan :

Tabel 5.25 Uraian Saldo Aset lain-lain Tahun 2022

No	Sub Unit Organisasi	Aset Lain-lain
		Rp 460.939.032,58
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Rp 311.900.032,58
2	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	Rp 149.039.000,00
3	UPT Pusat Kesehatan Hewan dan IB	Rp -
4	UPT Balai Benih Ikan	Rp -

b) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 149.039.000,00. Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan per 31 Desember 2022 berdasarkan Sub Unit Organisasi dan Obyek Penyusutan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.26 Uraian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

No.	Sub Unit Organisasi	Jumlah	
		Rp	
1	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Rp	-
2	UPT Balai Penyuluh Pertanian Pariaman	Rp	149.039.000,00
3	UPT Pusat Kesehatan Hewan dan IB	Rp	-
4	UPT Balai Benih Ikan	Rp	-

Mutasi Akumulasi Penyusutan Per Tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2021	283.194.750,00
Mutasi Tambah (+)	
-	
Mutasi Kurang (-)	
- Rusak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	75.570.000,00
- Rusak Berat UPT. BPPP	48.085.750,00
- Rusak Berat UPT. Puskesmas	10.500.000,00
Saldo Per 31 Desember 2022	149.039.000,00

5.2.2 Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek tahun 2022 sebesar Rp 0,- dan tahun 2021 senilai Rp 0,-. Tidak ada kewajiban jangka pendek sampai dengan tanggal pelaporan.

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas menunjukkan kekayaan bersih pemerintah. Nilai ini merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 18.188.429.333,58 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 15.271.590.039,00 dibandingkan tahun 2021. Untuk ekuitas akan lebih rinci dijelaskan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional dari suatu entitas akuntansi yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada tahun 2022 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015, sehingga Laporan Operasional TA 2022 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional TA 2021, rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan pada **Tabel 5.27** berikut.

Tabel 5.27 Laporan Operasional 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Kegiatan Operasional				
1	Pendapatan LO	151.875.000,00	132.473.000,00	19.402.000,00	14,65
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	151.875.000,00	132.473.000,00	19.402.000,00	14,65
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	151.875.000,00	132.473.000,00	19.402.000,00	14,65
1.1.2	Lain-lain PAD yang sah-LO				
2	Beban	19.272.498.212,00	17.684.848.046,00	1.587.650.166,00	8,98
2.1	Beban Pegawai	11.251.433.793,00	9.765.123.248,00	1.486.310.545,00	15,22
2.2	Beban Barang dan Jasa	6.449.962.151,00	5.680.659.458,00	769.302.693,00	13,54
2.3	Beban Hibah		- 189.515.371	189.515.371,00	(100,00)
2.4	Beban Bantuan Sosial		777.348.000,00	(777.348.000,00)	
2.5	Beban penyusutan peralatan dan mesin	472.022.845,00	551.341.697,00		
2.6	Beban penyusutan gedung dan bangunan	929.888.095,00	915.704.074,00		
2.7	Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	169.191.328,00	184.186.940,00		
	Surplus/ (Defisit) Dari Operasi	(19.120.623.212,00)	(17.552.375.046,00)	(1.568.248.166,00)	8,93
	Kegiatan Non Operasional				
1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	168.750,00	-2.963.750,00	3.132.500,00	(105,69)
	Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(168.750,00)	2.963.750,00	(3.132.500,00)	(105,69)
	Surplus/ (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(19.120.791.962,00)	(17.549.411.296,00)	- 1.571.380.666,00	8,95
	Surplus/ Defisit LO	(19.120.791.962,00)	(17.549.411.296,00)	(1.571.380.666,00)	8,95

Penjelasan atas rincian laporan operasional adalah sebagai berikut :

5.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 151.875.000,00 dan Rp 132.473.000,00. Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp 19.402.000,00 atau 14,65 % dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2021. Saldo Pendapatan-LO tahun 2022 dan 2021 merupakan saldo Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.28 Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp	% (Naik/ Turun)
I	Pendapatan-LO	151.875.000,00	132.473.000,00	14,65
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	151.875.000,00	132.473.000,00	14,65
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	151.875.000,00	132.473.000,00	14,65
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	65.000.000,00	(100,00)
	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	23.825.000,00	34.005.000,00	(29,94)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	128.050.000,00	33.468.000,00	282,60
1.1.2	Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-	
	Pendapatan dari Pengembalian-LO	-	-	

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan-LO Rp	Pendapatan LRA Rp	Selisih +/- (Rp)
PENDAPATAN	151.875.000,00	151.875.000,00	-
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	151.875.000,00	151.875.000,00	-

- Tidak terdapat selisih antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

5.3.2 Beban

Beban Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2022 adalah sebesar Rp 19.272.498.212,00. Nilai beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.587.650.166,00 atau 8,98% dibandingkan tahun 2021, uraian atas saldo disajikan pada **Tabel 5.29** berikut.

Tabel 5.29 Beban Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp	% Naik/(Turun)
1	Beban Pegawai - LO	11.251.433.793,00	9.765.123.248,00	15,22
2	Beban Barang dan Jasa	6.449.962.151,00	5.680.659.458,00	13,54
3	Beban Hibah		(189.515.371,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial		777.348.000,00	-
5	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	472.022.845,00	551.341.697,00	(14,39)
6	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	929.888.095,00	915.704.074,00	1,55
7	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.191.328,00	184.186.940,00	(8,14)
	Jumlah	19.272.498.212,00	17.684.848.046,00	8,98

1) Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai – LO Tahun 2022 sebesar 11.251.433.793,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.30 Beban Pegawai 2021 dan 2020

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% Naik/(Turun)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	7.064.223.954,00	6.811.510.969,00	3,71
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	4.075.509.839,00	2.654.878.189,00	53,51
3	Beban Uang Lembur - LO	0,00	0,00	-
4	Beban Honorarium PNS - LO	0,00	0,00	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	111.700.000,00	298.734.090,00	
	Jumlah	11.251.433.793,00	9.765.123.248,00	15,22

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa dikelompokkan atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas. Saldo beban barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,54% dibandingkan tahun 2021. Rincian atas penurunan beban barang dan jasa dijelaskan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 5.31 Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% Naik/(Turun)
1	Beban Persediaan	4.231.301.810,00	3.408.078.613,00	24,16
2	Beban Jasa	1.241.561.516,00	1.279.515.132,00	(2,97)
3	Beban Pemeliharaan	215.362.200,00	193.945.050,00	11,04
4	Beban Perjalanan Dinas	406.666.583,00	413.170.663,00	(1,57)
5	Beban Uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak keiga/pihak lain/kepada	422.851.750,00	385.950.000,00	9,56
	Jumlah	6.517.743.859,00	5.680.659.458,00	14,74

Uraian atas Beban Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp 4.231.301.810,00, jika dibandingkan 2021 mengalami kenaikan sebesar 24,16 %. Uraian Beban Persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.32 Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% Naik/(Turun)
1	Beban Bahan Pakai Habis	606.635.952,00	522.158.732,00	16,18
2	Beban Bahan/Material	577.022.610,00	466.725.010,00	23,63
3	Beban Cetak dan Penggandaan	69.196.500,00	68.938.500,00	0,37
4	Beban Makanan dan Minuman	177.870.000,00	195.236.000,00	(8,89)
6	Beban Pakaian Kerja Bngkel		8.400.000,00	(100,00)
7	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.600.000,00	67.200.000,00	(63,39)
8	Beban tidak dikapitalisasi peralatan & mesin	5.910.000,00		
9	Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	2.702.285.040,00	2.079.420.371,00	
	Jumlah	4.163.520.102,00	1.328.658.242,00	213,36

Pengujian LRA dan LO Persediaan dapat dilihat pada tabel 5.33 berikut ini :

Tabel 5.33 Perbandingan LO-LRA Persediaan

No	Jenis Persediaan	Persediaan Awal Tahun (Rp)	Belanja Barang Persediaan-LRA	Persediaan Akhir Tahun	Persediaan yang digunakan	Beban Persediaan-LO	Selisih LO-LRA
1	Bahan Pakai Habis	113.954.000,00	528.653.330,00	35.971.378,00	606.635.952,00	606.635.952,00	-
2	Bahan/Material	85.590.000,00	553.967.610,00	62.535.000,00	577.022.610,00	577.022.610,00	-
3	Cetak dan Penggandaan	-	69.196.500,00	-	69.196.500,00	69.196.500,00	-
4	Makanan dan Minuman	-	177.870.000,00	-	177.870.000,00	177.870.000,00	-
6	Tidak Dikapitalisasi	-	-	-	-	5.910.000,00	5.910.000,00
7	Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	24.600.000,00	-	24.600.000,00	24.600.000,00	-
8	Belanja barang untuk dijual/diserahkan	-	2.702.285.040,00	-	2.079.420.371,00	2.702.285.040,00	
	Jumlah	199.544.000,00	4.056.572.480,00	98.506.378,00	3.534.745.433,00	4.163.520.102,00	5.910.000,00

- Terdapat selisih antara LO-LRA Persediaan sebesar Rp 5.910.000,00. Nilai ini merupakan beban persediaan atas belanja yang tidak dikapitalisasi peralatan dan mesin senilai Rp. 5.910.000,-

b) Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp 1.241.561.516,00 atau turun sebesar 2,97% dibandingkan tahun 2021. Secara umum, objek beban jasa mengalami penurunan di tahun 2022, hanya beban jasa kantor dan beban jasa kursus/pelatihan, sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan yang mengalami peningkatan. Uraian beban jasa tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.34** berikut ini.

Tabel 5.34 Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Jasa Kantor	1.216.572.292,00	1.271.569.972,00	-4,33
2	Beban Iuran Jaminan / Asuransi	2.989.224,00	2.945.160,00	1,50
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
4	Beban Sewa Peralatan dan mesin	4.500.000,00		
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
6	Beban Jasa Konsultansi			
7	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	17.500.000,00	5.000.000,00	250,00
8	Beban Honorarium Non Pegawai			
9	Beban Jasa Pihak Ketiga			
10	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
11	Beban Barang dan Jasa			
12	Beban Jasa Pengujian Laboratorium			
TOTAL		1.241.561.516,00	1.279.515.132,00	(2,97)

c) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 193.945.050,00 dan 453.018.026,00, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan beban pemeliharaan sebesar 57,19 % di tahun 2021. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.35 Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Jasa Service			
2	Beban Penggantian Suku Cadang			
3	Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas			
4	Beban Jasa KIR			
5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor			
6	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan			
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.133.700,00	140.050.050,00	24,34
8	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41.228.500,00	53.895.000,00	(23,50)
9	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
TOTAL		215.362.200,00	193.945.050,00	11,04

d) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021, mengalami penurunan sebesar 1,57%. Berikut dibawah ini disajikan rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021.

Tabel 5.36 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	298.298.000,00	268.710.000,00	11,01
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	108.368.583,00	144.460.663,00	(24,98)
TOTAL		406.666.583,00	413.170.663,00	(1,57)

3) Beban Hibah

Beban Hibah di Tahun 2022 dan 2021 merupakan Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat. Rincian atas Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.37 Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	422.851.750,00		0,00
2	Beban hibah uang kepada Pemerintah Pusat		-189.515.371,00	-100,00
TOTAL		422.851.750,00	0,00	-

4) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.571.102.268,00. Dibandingkan Tahun 2021, nilai beban ini mengalami penurunan sebesar 4,85 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.38 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% Naik/(Turun)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	472.022.845,00	551.341.697,00	-14,39
2	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	929.888.095,00	915.704.074,00	1,55
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	169.191.328,00	184.186.940,00	(8,14)
Jumlah		1.571.102.268,00	1.651.232.711,00	(4,85)

Nilai Beban penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp 1.571.102.268,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan (Rp)		Selisih Akumulasi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)		Selisih Akumulasi Amortisasi (Rp)	Penghapusan Akumulasi Penyusutan 2022	Beban Penyusutan dan Amortisasi
2021	2022		2021	2022			
1	2	3 = 2-1	4	5	6 = 5-4	9	10 = 4+8+9
20.960.555.017	22.531.252.284	1.570.697.267,00	0,00	0,00	0,00	405.001,00	1.571.102.268,00

5.3.3 Surplus/ Defisit dari Operasi

Surplus/ Defisit dari operasi merupakan selisih antara pendapatan LO dan Beban. Nilai Pendapatan-LO 2022 yang lebih rendah dari Beban di tahun 2021 menghasilkan nilai defisit di tahun 2022 sebesar Rp 19.120.623.212,00. Nilai defisit ini mengalami kenaikan sebesar 8,93% dibandingkan tahun 2021.

5.3.4 Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa yang merupakan akumulasi surplus/ defisit operasional dan non operasional di tahun 2021 adalah sebesar (Rp 19.120.791.962,00). Nilai defisit ini mengalami kenaikan sebesar 8,95% dibandingkan tahun 2021.

5.3.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/ Defisit-LO menggambarkan surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional dan surplus/ defisit pos luar biasa. Selisih Pendapatan-LO dengan Beban menghasilkan surplus/ defisit kegiatan operasional. Sedangkan surplus/ defisit kegiatan non operasional diperoleh dari selisih surplus/ defisit penjualan aset non lancar LO, penyelesaian kewajiban jangka panjang LO dan kegiatan non operasional lainnya. Selisih antara Pendapatan Luar Biasa-LO dengan Beban Luar Biasa menghasilkan Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa.

Setelah dilakukan penghitungan Surplus /Defisit-LO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (19.120.791.962,00). Nilai ini sama dengan nilai defisit sebelum pos luar biasa karena tidak terdapat beban tak terduga di tahun 2022.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 18.188.429.333,58 Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.097.996.361,00 atau 6,42 % dibandingkan 31 Desember 2021.

Rincian Perubahan Ekuitas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.39 Ekuitas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 Rp	31-Des-21 Rp	% Kenaikan/ (Penurunan)
Ekuitas Awal	17.090.432.972,58	17.765.127.602,58	(3,80)
Surplus/Defisit - LO	(19.120.791.962,00)	(17.549.411.296,00)	8,95
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar			
Koreksi ekuitas lainnya	405.000,00	45.601.000,00	(99,11)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	20.218.383.323,00	16.829.115.666,00	20,14
Ekuitas Akhir	18.188.429.333,58	17.090.432.972,58	6,42

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp 17.090.432.972,58 merupakan saldo ekuitas Dinas Pertanian dan Pangan pada 31 Desember 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (19.120.791.962,00) diperoleh sebagaimana dijelaskan pada sub bab pos-pos Laporan Operasional (LO).

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar tahun 2022 adalah sebesar Rp 405.000,-. Nilai ini merupakan koreksi ekuitas lainnya atas :

- Aset Tanah senilai Rp 405.000,00 (Koreksi - Atas Saldo Penghapusan Akumulasi Penyusutan)

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20.218.383.323,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 20,14 % dibandingkan 31 Desember 2021

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp 18.188.429.333,58 diperoleh dari nilai Ekuitas awal ditambah surplus/defisit LO tahun berjalan, koreksi ekuitas lainnya dan kewajiban untuk dikonsolidasikan.

BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1 Penggantian Manajemen selama Tahun Berjalan

Pada tahun 2022 terjadi penggantian manajemen yaitu:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Periode	Tanggal SK
1	ISMADI, SP	Kasi Pengelolaan Pertamanan Dinas Perkim LH	Kasi. Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pertanian	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
2	NOERLENI AZHAR, SP	Kasi. Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pertanian	Kasi. Perkebunan	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
3	WIDYA HARTIKA, S.TP	Kasi. Perkebunan	Kasi. Kesehatan Hewan	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
4	IKHSAN VERNATA, S.Pt	Kasi. Pembibitan Dan Produksi	Kasi. Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
5	MELIA RIZKI YUANITA, S.TP	Kasubag. TU UPTD. Puskesmas Dan IB	Kasi. Pembibitan Dan Produksi	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
6	FENI SYOFIANTI, A.Md	Plt. Kasubag Keuangan	Kasubag . Keuangan	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
7	BAHAGIA FITRI, S.Pi	Plt. Kasubag TU UPTD. BPPP	Kasubag TU UPTD. BPPP	17 Januari 2022 s/d 11 Oktober 2022	17/01/2022
8	drh. RENI GUSNITA	Medik Veteriner Pertama	Kepala Uptd. Puskesmas dan IB	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
9	ZULKARNAINI, S.Sos	Pelaksana	Kasubag. TU UPTD. BBI	17 Januari 2022 s/d 30 Mei 2022	17/01/2022
10	ERMILINDA, A.Md	Pelaksana	Kasubag. TU UPTD. Puskesmas dan IB	17 Januari 2022 s/d Sekarang	17/01/2022
11	drh. DAHLIA	Kepala Uptd. Puskesmas Dan IB	Medik Veteriner Muda	1 April 2022 s/d Sekarang	31/03/2022
12	RIZKA HAFIZAH, S.TP.MP	Penyuluh Pertanian Madya	Plt. Kepala UPTD.BPPP	28 April 2022 s/d 11 Oktober 2022	28/04/2022
13	MULYADI	Kepala UPTD. BPPP	Penyuluh Pertanian Penyelia	1 Mei 2022 s/d Sekarang	20/04/2022
14	ILHAM, S.Pi	Kasi. Perikanan Budidaya	Analisis Akuakultur Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
15	NOERLENI AZHAR, SP	Kasi. Perkebunan	Analisis Prasarana & Sarana Pertanian Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16	RAHMANIZA AZIZ, SP	Kasi. Ketersediaan, Kerawanan Dan Keamanan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
17	ANDRI TAZARLI, S.Kel	Kasi . Kelembagaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
18	RICHI ILYAS, S.Pi	Kasi. Perikanan Tangkap	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
19	WIDYA HARTIKA, S.TP	Kasi. Kesehatan Hewan	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
20	M. NASIR, S.Pi	Kasubag. Perencanaan Dan Program	Perencana Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
21	FENI SYOFIANTI, A.Md	Kasubag . Keuangan	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
22	JONNY ARDI, S.Pi	Kasi. Pds Dan Keanekaragaman Pangan	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
23	EDIALFI UNWARA, SP	Kasi. Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
24	ADRIAN SYAHPUTRA, S.Pi	Kasi. Distribusi Dan Cadangan Pangan	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
25	MELIA RIZKI YUANITA, S.TP	Kasi. Pembibitan Dan Produksi	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
26	IKHSAN VERNATA, S.Pt	Kasi. Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
27	ISMADI, SP	Kasi. Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pertanian	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda	31 Mei 2022 s/d Sekarang	30/05/2022
28	ALFADRI YUSRA, S.Pi, M.Si	Kepala UPTD. BBI	Pindah Dinas	1 Januari s/d 3 Oktober 2022	03/10/2022
29	RIZKA HAFIZAH, S.TP.MP	Plt. Kepala UPTD.BPPP	Kepala UPTD.BPPP	12 Oktober 2022 s/d Sekarang	11/10/2022
30	BAHAGIA FITRI, S.Pi	Kasubag TU UPTD. BPPP	Kepala UPTD. BBI	12 Oktober 2022 s/d Sekarang	11/10/2022
31	IIN WIRA SWASTI, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Kasubag TU UPTD. BPPP	12 Oktober 2022 s/d Sekarang	11/10/2022

6.2 Pengungkapan Lainnya

1) Informasi Pendapatan Dan Belanja Akrual

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran

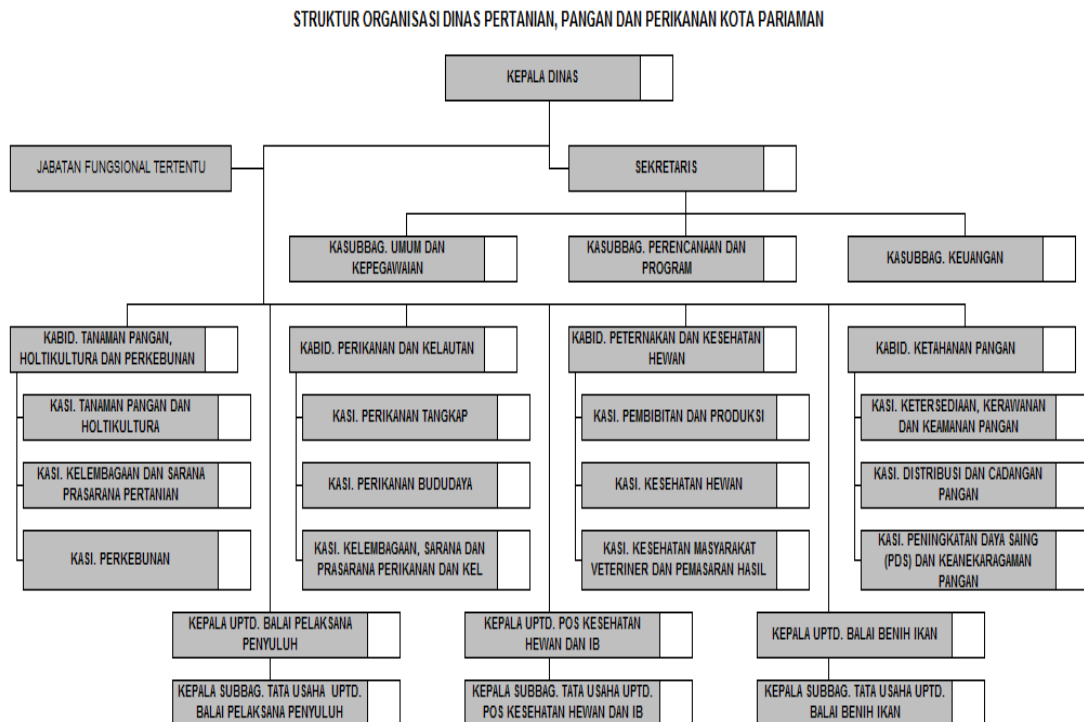
2) Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening
1.	0500.0101.00472-4	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2.	0500.0101.00743-9	UPT. Balai Benih Ikan
3.	0500.0101.00984-9	UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
4.	0500.0101.00793-2	UPT Puskesmas dan IB

6.3 Struktur Organisasi

Berikut dibawah ini gambar struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2022 :





DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman terdiri dari:
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - 3) Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian
 - c. Seksi Perkebunan
 - 4) Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahi:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Perikanan Budidaya
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
 - 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran Hasil
 - 6) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - a. Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Keamanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Seksi Peningkatan Daya Saing (PDS) dan Keanekaragaman Pangan
 - 7) UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian, membawahi:
 - a. Subag Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
 - 8) UPTD Pos Kesehatan Hewan IB
 - a. Subag Tata Usaha UPTD Pos Kesehatan Hewan IB
 - 9) UPTD Balai Benih Ikan
 - a. Subag Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan

2. Pegawai kontrak

Selain PNS, dalam mendukung kegiatan operasional Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdapat personil tenaga kontrak berjumlah 35 orang yang terdiri atas 1 orang Tenaga Harian Lepas (THL) Medik Veteriner, 2 orang Penyelia Mitra Tani (PMT), 3 orang Tenaga Administrasi, 2 orang Penyuluh Perikanan Bantu dari Kementerian Kelautan



DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan Perikanan, 4 orang Tenaga Pembenihan, 2 orang Tenaga Operasional Kapal, 1 orang Tenaga Operasional Posikandu dan 10 orang Tenaga Kebersihan, 1 orang tenaga teknis logistic & pemasaran hasil, 1 orang tenaga teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman, 4 orang petugas teknis BBI, 1 orang Tenaga Kebun, 1 orang Tenaga Pengelola Pembibitan, 1 orang Tenaga Pembibitan Unggas dan 1 orang Sopir.

6.4 Kepemimpinan OPD

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang dibawah koordinasinya. Pada Sekretariat Dinas, terdapat 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah koordinasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri atas 3 UPT, yaitu UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, UPT Puskesmas dan IB dan UPT Balai Benih Ikan.

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat Tahun 2021	Nama Pejabat Tahun 2022
1	Kepala Dinas	Dasril, S.Sos	Dasril, S.Sos
2	Sekretaris	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Ferialdi, S.Pi, M.Si
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Marlina Sepa, SP, M.Si	Marlina Sepa, SP, M.Si
4	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Citrha Aditur Bahri, S.Pi
5	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Emiwarti, S.Pt	Emiwarti, S.Pt
6	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Marini Jamal, S.Pt, MM	Marini Jamal, S.Pt, MM
7	Kepala UPT Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Mulyadi s/d April 2022	Rizka Hafizah, STP, MP
8	Kepala UPT Puskesmas dan IB	Drh. Dahlia	Drh. Reni Gusnita
9	Kepala UPT Balai Benih Ikan	Alfadri Yusra, S.Pi s/d 03 Oktober 2022	Bahagia Fitri, S.Pi

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu peningkatan kinerja khususnya **Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan** dapat dicapai seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana yang lengkap.

Disisi Belanja **Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan** Kota Pariaman dapat melaksanakannya dengan secara efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

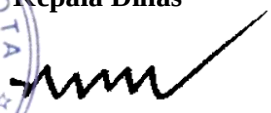
Laporan keuangan tahun 2022 ini, mengacu pada undang-undang di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Sistem ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya pada PPKD Kota Pariaman dapat mempergunakannya untuk bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

Laporan ini mungkin masih ada beberapa kekurangan, tetapi kami telah mengusahakan secara maksimal supaya laporan ini tersusun secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk masa yang akan datang kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari pihak yang berkompeten sehingga laporan keuangan yang disusun lebih baik lagi.

Dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini maka kinerja **Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan** Kota Pariaman lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Pariaman, Februari 2023
Kepala Dinas

Dasril, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002





DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD **Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan** Kota Pariaman terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran, b.) Laporan Operasional c.) Neraca, d.) Laporan Perubahan Ekuitas, e.) Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Pariaman, Februari 2023
Kepala Dinas

Dasril, S.Sos

NIP. 19691219 199303 1 002